

Published online on the page: <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/jannah>

**J A N N A H**  
**Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat**  
 | ISSN (Online) 3090-6636 |



# Pendampingan Pembuatan Qris Melalui GoPay Merchant Bagi Umkm Di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Faiz Fathurrahman Tamim<sup>1,\*</sup>, Anik Aprilia Nur Fajar<sup>1</sup>, Nabilah Luthfi Salwa<sup>1</sup>, Arrum Arufi Husniddar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

## Informasi Artikel

### Sejarah Artikel:

Submit: 09 September 2026

Revisi: 29 September 2026

Diterima: 07 Oktober 2026

Diterbitkan: 07 Oktober 2026

## Kata Kunci

Digitalisasi, UMKM, QRIS

## Correspondence

E-mail: 236111009@mhs.uinsaid.ac.id\*

## A B S T R A K

Pembayaran digital mulai menjadi bagian dari kegiatan UMKM, tetapi kesiapan setiap pelaku usaha, terutama di wilayah perdesaan, tidak sama. Program Kuliah Kerja Nyata ini bertujuan mengenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan mendampingi pendaftaran GoPay Merchant pada UMKM di Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kegiatan berlangsung pada 29 Juni sampai 4 Juli 2026. Data dihimpun melalui kunjungan langsung, observasi, tanya jawab, edukasi, pendampingan, dan dokumentasi, kemudian disajikan secara deskriptif. Sebanyak 56 UMKM berhasil didatangi. Sebelum kegiatan, 20 UMKM (35,7%) sudah memiliki QRIS. Sebanyak 12 UMKM (21,4%) bersedia mengikuti pendampingan pembuatan QRIS, sedangkan 24 UMKM (42,9%) belum menggunakannya. Pelaku usaha yang belum memakai QRIS menyampaikan beberapa alasan, yaitu belum terbiasa menggunakan telepon seluler untuk transaksi, menganggap pembayaran digital cukup rumit, sudah memakai metode pembayaran lain, atau masih merasa pembayaran tunai lebih praktis. Kunjungan dari tempat usaha ke tempat usaha memudahkan tim menyesuaikan penjelasan dan membantu pelaku usaha menyelesaikan tahap pendaftaran. Hasil kegiatan ini menunjukkan perluasan akses awal terhadap QRIS, tetapi belum membuktikan penggunaan rutin ataupun peningkatan pendapatan. Tindak lanjut yang diperlukan meliputi simulasi transaksi, edukasi keamanan akun, pencatatan keuangan sederhana, dan pemantauan penggunaan QRIS setelah pendaftaran.

## Abstract

Digital payments are increasingly used by micro, small, and medium enterprises (MSMEs), although business owners in rural areas do not have the same level of readiness. This community service program introduced the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) and assisted MSME owners in registering for GoPay Merchant in Bulurejo Village, Juwiring District, Klaten Regency. The program was carried out from 29 June to 4 July 2026. Data were collected through direct visits, observation, informal interviews, education, registration assistance, and documentation, and were then described qualitatively. The team reached 56 MSMEs. Before the program, 20 MSMEs (35.7%) already had QRIS. Twelve MSMEs (21.4%) agreed to receive assistance in creating QRIS, while 24 MSMEs (42.9%) had not adopted it. The reasons mentioned by non-users included unfamiliarity with using mobile phones for transactions, the perception that digital payments were complicated, the use of other payment methods, and a continued preference for cash. Visiting each business allowed the team to adapt the explanation to the owner's level of digital familiarity and assist interested participants during registration. The results indicate broader initial access to QRIS, but they do not demonstrate regular use or increased income. Follow-up activities should include transaction simulations, account security education, simple financial record-keeping, and monitoring after registration.

This is an open access article under the CC-BY-SA license





## 1. Pendahuluan

Pembayaran nontunai mulai hadir dalam kegiatan usaha sehari-hari di desa. Sebagian konsumen menggunakan mobile banking atau dompet digital, sementara transaksi tunai tetap dominan di banyak usaha kecil. Keadaan ini membuat pelaku UMKM perlu memahami pilihan pembayaran yang tersedia. Pengenalan pembayaran digital tidak dimaksudkan untuk menghapus pembayaran tunai, tetapi untuk menambah pilihan bagi konsumen dan membantu usaha beradaptasi dengan perubahan cara bertransaksi.

Perkembangan QRIS secara nasional menunjukkan bahwa pembayaran berbasis kode QR semakin banyak digunakan oleh UMKM. Sampai Juni 2026, Bank Indonesia mencatat 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant QRIS; 96,68% di antaranya merupakan UMKM. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang besar, tetapi tidak berarti bahwa pemahaman dan kesiapan pelaku usaha sudah merata hingga ke tingkat desa.[1]

QRIS adalah standar kode QR untuk pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran. Satu kode QRIS dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang sudah mendukung standar tersebut.[2] Ketentuan pelaksanaannya terus diperbarui, salah satunya melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025.[3] Bagi usaha kecil, penggunaan satu standar lebih praktis karena merchant tidak perlu menyediakan kode yang berbeda untuk setiap aplikasi pembayaran.

Tersedianya teknologi tidak langsung membuat setiap pelaku usaha bersedia menggunakannya. Setiawan dan Mahyuni menjelaskan bahwa niat UMKM untuk memakai QRIS berkaitan dengan manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, dorongan dari konsumen atau lingkungan, serta hambatan seperti biaya dan koneksi internet.[4] Karena itu, edukasi tidak cukup berhenti pada penjelasan mengenai fungsi QRIS. Pelaku usaha juga perlu memahami cara kerja serta menilai apakah layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Tantangan di wilayah perdesaan juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi dan ketersediaan infrastruktur. Listiyono dan rekan-rekan menilai QRIS mempunyai peluang untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan, tetapi penerapannya masih dibatasi oleh literasi digital serta infrastruktur teknologi yang belum merata.[5] Temuan tersebut menunjukkan bahwa materi pendampingan perlu disampaikan dengan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.

Pendampingan langsung telah digunakan dalam beberapa program pengabdian sebelumnya. Kegiatan di Desa Dagen, Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa edukasi dan bantuan teknis dapat membantu pelaku UMKM memahami pembayaran digital.[6] Penelitian mengenai QRIS melalui GoPay Merchant di wilayah perdesaan juga mencatat manfaat pada kecepatan transaksi dan pencatatan, sekaligus menemukan kendala terkait literasi digital dan jaringan internet.[7] Dua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran aplikasi perlu disertai proses belajar dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

Penerimaan pelaku usaha terhadap pembayaran digital dapat dipahami melalui Technology Acceptance Model (TAM). Model ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung menerima suatu teknologi apabila teknologi tersebut dipandang bermanfaat dan mudah digunakan. Dalam konteks QRIS, pelaku UMKM akan lebih terbuka menggunakan layanan tersebut apabila mereka memahami

manfaatnya bagi transaksi usaha serta merasa mampu mengoperasikannya dengan baik.[12] Perspektif ini digunakan untuk membaca perbedaan kesiapan UMKM dalam menerima QRIS setelah memperoleh edukasi dan pendampingan.

Kondisi yang hampir sama juga ditemukan selama kegiatan KKN di Desa Bulurejo. Dari komunikasi awal dengan pelaku usaha, tim menjumpai UMKM yang sudah memiliki QRIS, UMKM yang masih mengandalkan pembayaran tunai, dan UMKM yang telah menggunakan cara pembayaran lain. Alasan belum menggunakan QRIS juga beragam. Ada yang belum terbiasa menggunakan telepon seluler untuk transaksi, ada yang menilai prosesnya rumit, dan ada yang belum merasa membutuhkannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan diarahkan ke dua bentuk layanan. Seluruh UMKM yang didatangi memperoleh penjelasan dasar mengenai QRIS, sedangkan pelaku usaha yang berminat mendapat pendampingan pendaftaran melalui GoPay Merchant. Artikel ini membahas kondisi awal penggunaan QRIS, hasil pendampingan, serta alasan UMKM yang belum mengadopsi QRIS. Hasil program tidak digunakan untuk menyatakan adanya kenaikan omzet karena data transaksi dan pendapatan tidak dikumpulkan.

## 2. Metode Pelaksanaan

### 2.1. Lokasi, Waktu, dan Sasaran Kegiatan

Program ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Nyata mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta di Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kegiatan dilaksanakan pada 29 Juni sampai 4 Juli 2026. Tim mendatangi 56 UMKM di tempat usahanya. Jumlah tersebut adalah UMKM yang berhasil dijangkau selama pelaksanaan program, bukan jumlah keseluruhan UMKM di Desa Bulurejo.

Artikel menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena fokus kegiatan adalah menggambarkan kondisi penggunaan QRIS, tanggapan pelaku usaha, dan kendala yang mereka sampaikan.[8] Data jumlah dan persentase dipakai sebagai informasi pendukung agar hasil pemetaan lebih mudah dibaca.[9]

### 2.2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan secara door-to-door. Tim mendatangi tempat usaha, menanyakan metode pembayaran yang biasa digunakan, menjelaskan QRIS, lalu menawarkan pendampingan kepada pelaku usaha yang berminat. Cara ini dipilih agar penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata setiap usaha. Rangkaian kegiatan diringkas dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Tahapan pelaksanaan kegiatan

| Tahap         | Kegiatan Utama                                                                                | Luaran yang Dicatat                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan awal | Mendatangi UMKM, menanyakan metode pembayaran, dan mengidentifikasi kepemilikan QRIS.         | Status awal: sudah memiliki QRIS atau belum.                               |
| Edukasi       | Menjelaskan pengertian QRIS, manfaat, cara kerja, dan posisi QRIS sebagai pilihan pembayaran. | Pelaku usaha memperoleh informasi dasar dan dapat menyampaikan pertanyaan. |
| Pendampingan  | Mendampingi pelaku usaha yang bersedia dalam proses pembuatan QRIS melalui GoPay Merchant.    | Jumlah UMKM yang mengikuti dan menyelesaikan pendampingan pembuatan QRIS.  |
| Rekapitulasi  | Mengelompokkan status penggunaan QRIS dan merangkum alasan belum mengadopsi.                  | Data jumlah, persentase, serta kategori hambatan yang ditemukan.           |

### 2.3. Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui observasi, tanya jawab langsung, pendampingan, dan dokumentasi. Jumlah UMKM pada setiap kelompok dihitung berdasarkan 56 usaha yang didatangi. Jawaban mengenai alasan belum menggunakan QRIS kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna. Karena jawaban tidak dikumpulkan melalui angket terstruktur, hasilnya disajikan sebagai kategori alasan dan tidak dihitung dalam persentase.[10]

Kegiatan ini tidak memakai pretest dan posttest serta belum memantau transaksi setelah QRIS dibuat. Evaluasi karena itu dibatasi pada jangkauan edukasi, status kepemilikan QRIS, jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan, dan alasan belum mengadopsi. Pembuatan QRIS hanya dilakukan bagi pelaku usaha yang menyatakan bersedia. Pelaku yang belum berminat tetap memperoleh informasi dasar dan tidak dipaksa untuk mendaftar.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pemetaan Kondisi Penggunaan QRIS

Tim memberikan edukasi kepada 56 UMKM yang berhasil didatangi. Hasil pendataan membagi pelaku usaha ke dalam tiga kelompok: 20 UMKM sudah memiliki QRIS sebelum kegiatan, 12 UMKM bersedia mengikuti pendampingan pembuatan QRIS, dan 24 UMKM belum menggunakan QRIS setelah edukasi. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil pemetaan dan pendampingan QRIS pada UMKM yang didatangi

| Kelompok hasil                        | Jumlah | Persentase | Keterangan                                                          |
|---------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sudah memiliki QRIS sebelum kegiatan  | 20     | 35,7%      | Telah memiliki akses QRIS sebelum tim melakukan pendampingan.       |
| Mengikuti pendampingan pembuatan QRIS | 12     | 21,4%      | Bersedia dan membutuhkan bantuan dalam proses pembuatan.            |
| Belum menggunakan QRIS                | 24     | 42,9%      | Belum mengadopsi setelah edukasi karena pertimbangan masing-masing. |
| Total                                 | 56     | 100,0%     | Seluruh UMKM yang dijangkau selama kegiatan.                        |

Kelompok yang belum menggunakan QRIS merupakan kelompok terbesar, yaitu 24 usaha atau 42,9%. Di lapangan, tingkat kesiapan pelaku usaha dalam menggunakan pembayaran digital cukup beragam. Sebagian pelaku usaha belum memiliki telepon seluler yang mendukung transaksi digital, sementara sebagian lainnya masih belum memahami cara menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Salah satu pelaku usaha menyampaikan, “Saya belum punya HP yang bisa digunakan untuk pembayaran seperti itu.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan perangkat menjadi salah satu kendala teknis dalam penggunaan QRIS.

Selain keterbatasan perangkat, terdapat pula pelaku usaha yang belum memahami penggunaan QRIS dan belum memiliki ketertarikan untuk beralih dari pembayaran tunai. Salah satu pelaku usaha menyampaikan, “Saya belum begitu paham cara pakainya, jadi masih nyaman menggunakan pembayaran tunai.” Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan penggunaan QRIS tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan pemahaman dan kebiasaan pelaku usaha dalam melakukan transaksi.

Pada akhir kegiatan, proses pembuatan QRIS pada 12 UMKM yang didampingi telah selesai. Jumlah UMKM yang tercatat mempunyai akses QRIS kemudian bertambah dari 20 menjadi 32 usaha. Perubahan tersebut ditampilkan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Perubahan jumlah UMKM yang memiliki QRIS

| Indikator                     | Sebelum Kegiatan | Setelah Kegiatan | Perubahan |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| UMKM yang memiliki QRIS       | 20 (35,7%)       | 32 (57,1%)       | +12 UMKM  |
| UMKM yang belum memiliki QRIS | 36 (64,3%)       | 24 (42,9%)       | -12 UMKM  |

Tambahan 12 UMKM tidak boleh langsung diartikan sebagai keberhasilan penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Data kegiatan hanya menunjukkan bahwa QRIS telah dimiliki atau proses pembuatannya telah selesai. Tim belum mencatat frekuensi transaksi, nilai pembayaran, jumlah konsumen yang memakai QRIS, maupun perubahan omzet. Dengan batasan tersebut, capaian program lebih tepat disebut sebagai perluasan akses awal terhadap pembayaran digital.[14]

### 3.2. Edukasi dan Pendampingan Secara Langsung

Pemahaman pelaku UMKM mengenai QRIS tidak sama. Sebagian sudah mengenal dan memakai QRIS, sebagian pernah melihat kode QR tetapi belum memahami proses pembayarannya, dan sebagian lain baru memperoleh penjelasan saat kunjungan. Tim kemudian menyesuaikan materi. Pelaku yang masih awam mendapat penjelasan dari pengertian dan cara pembayaran, sedangkan pelaku yang sudah mengenal QRIS lebih banyak bertanya tentang pendaftaran dan penggunaan aplikasi merchant.

Kunjungan langsung membuat pelaku usaha dapat bertanya tanpa harus meninggalkan aktivitas jual beli. Tim juga dapat melihat kesiapan perangkat, kebiasaan transaksi, dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Pendekatan ini memang memerlukan waktu lebih panjang daripada sosialisasi kelompok, tetapi lebih mudah diterima oleh pelaku usaha yang belum terbiasa mengikuti pelatihan formal.

Pendaftaran GoPay Merchant memerlukan beberapa data, antara lain nomor telepon, verifikasi identitas, informasi usaha, dan rekening bank untuk pencairan dana. Bagi pengguna yang terbiasa memakai aplikasi, tahap tersebut mungkin terasa sederhana. Bagi sebagian pelaku UMKM, istilah dan urutannya masih membingungkan. Peran tim adalah menjelaskan proses dan membantu ketika ada kesulitan, tanpa mengambil alih keputusan pelaku usaha.

Hasil di Bulurejo dapat dibandingkan dengan program Larasati, Ahsani, dan Rosalita yang menggunakan pelatihan, pendampingan, dan monitoring dalam digitalisasi pembayaran UMKM desa. Kesamaannya terletak pada kebutuhan akan contoh dan bantuan teknis. Informasi satu kali belum selalu cukup, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali menggunakan aplikasi pembayaran[11].

### 3.3. Alasan UMKM Belum Menggunakan QRIS

Setelah edukasi, masih terdapat 24 UMKM yang belum menggunakan QRIS. Tim tidak meminta pelaku usaha memilih satu jawaban tertentu dan tidak menghitung berapa kali setiap alasan muncul. Oleh karena itu, temuan pada bagian ini disajikan sebagai kelompok alasan, bukan sebagai persentase hambatan. Ringkasannya terdapat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Kategori alasan belum menggunakan QRIS dan kebutuhan tindak lanjut

| Kategori Temuan                                        | Makna di Lapangan                                                                         | Tindak Lanjut yang Relevan                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum terbiasa memakai telepon seluler untuk transaksi | Telepon seluler lebih sering dipakai untuk komunikasi, bukan untuk menerima pembayaran.   | Latihan bertahap mulai dari membuka aplikasi, melihat notifikasi, dan mengecek riwayat transaksi. |
| Pembayaran digital dianggap rumit                      | Pelaku usaha membayangkan adanya banyak langkah dan risiko salah mengoperasikan aplikasi. | Demonstrasi singkat dan simulasi transaksi dengan bahasa sederhana.                               |
| Sudah memakai metode pembayaran lain                   | Pelaku merasa kebutuhan transaksi telah dipenuhi melalui transfer atau cara lain.         | Jelaskan fungsi QRIS sebagai pilihan tambahan, bukan pengganti wajib.                             |
| Pembayaran tunai dianggap lebih                        | Tunai telah menjadi kebiasaan dan                                                         | Pertahankan opsi tunai sambil                                                                     |

|       |                                               |                                                   |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| mudah | dapat digunakan tanpa perangkat atau koneksi. | memperkenalkan QRIS saat ada permintaan konsumen. |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Berdasarkan hasil komunikasi dengan pelaku usaha, masih adanya 24 UMKM yang belum menggunakan QRIS setelah kegiatan tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat kurangnya informasi atau belum adanya pendampingan. Seluruh UMKM yang didatangi telah memperoleh edukasi dasar mengenai QRIS, meliputi fungsi QRIS sebagai metode pembayaran, manfaatnya bagi transaksi usaha, serta gambaran cara penggunaannya. Tim juga menawarkan pendampingan pembuatan QRIS kepada pelaku usaha yang berminat. Bagi UMKM yang bersedia, pendampingan dilakukan hingga proses pendaftaran selesai dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penggunaan QRIS dalam menerima pembayaran. Namun demikian, pemberian edukasi dan bantuan teknis belum selalu diikuti oleh keputusan setiap pelaku usaha untuk menggunakan QRIS pada saat kegiatan berlangsung.

Perbedaan keputusan tersebut berkaitan dengan kebiasaan dan kesiapan masing-masing pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha belum terbiasa menggunakan telepon seluler sebagai sarana menerima pembayaran. Telepon seluler lebih sering digunakan untuk keperluan komunikasi, sedangkan transaksi usaha sehari-hari masih dilakukan secara tunai. Ketika pembayaran digital memerlukan penggunaan aplikasi, penerimaan notifikasi, pengecekan transaksi, dan pemahaman terhadap proses pencairan dana, beberapa pelaku usaha merasa belum cukup yakin untuk mengoperasikannya secara mandiri. Dengan demikian, kendala yang muncul tidak selalu berupa ketidakmampuan menggunakan perangkat, tetapi juga berkaitan dengan rasa percaya diri dan kebiasaan dalam menjalankan transaksi usaha.

Selain itu, pembayaran tunai masih dipandang sebagai metode yang paling praktis oleh sebagian pelaku usaha. Uang tunai dapat diterima secara langsung, dihitung pada saat transaksi, dan segera digunakan untuk keperluan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Preferensi terhadap pembayaran tunai juga dapat berkaitan dengan karakter pelanggan. Apabila pembeli sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar dan terbiasa membawa uang tunai, pelaku usaha belum tentu merasakan kebutuhan yang mendesak untuk menambah pilihan pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan QRIS tidak selalu langsung dipahami sebagai pengganti uang tunai, melainkan perlu diperkenalkan sebagai alternatif ketika konsumen membutuhkan pembayaran non-tunai.

Beberapa UMKM telah menggunakan metode pembayaran lain, seperti transfer melalui rekening bank atau layanan pembayaran digital tertentu. Metode yang telah digunakan tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Dalam kondisi demikian, QRIS belum tentu dianggap memberikan manfaat tambahan yang langsung terlihat. Pelaku usaha dapat memilih mempertahankan cara pembayaran yang sudah dikenal karena merasa lebih nyaman dan tidak perlu mempelajari prosedur baru. Pada sebagian usaha, penilaian tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh jumlah transaksi yang relatif terbatas, pelanggan yang dominan membayar tunai, atau belum adanya permintaan dari konsumen untuk menggunakan QRIS. [10]

Kesiapan perangkat juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendampingan. Tidak semua pelaku usaha memiliki telepon seluler yang memadai untuk mengakses aplikasi merchant secara nyaman, membawa telepon seluler saat berjualan, atau memiliki akses internet yang selalu stabil. Kondisi tersebut tidak dihitung sebagai kategori hambatan tersendiri dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu, keterbatasan perangkat dan jaringan tidak dapat dinyatakan sebagai alasan utama bagi seluruh UMKM yang belum menggunakan QRIS. Meskipun demikian, kedua faktor tersebut tetap penting diperhatikan karena dapat memengaruhi keberlanjutan penggunaan QRIS setelah proses pendaftaran dilakukan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Setiawan dan Mahyuni yang menjelaskan bahwa penggunaan QRIS pada UMKM berkaitan dengan manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan,

pengaruh lingkungan, dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha.[4] Literasi digital juga menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam penerapan pembayaran digital pada UMKM.[5] Namun, penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai pembandingan, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa seluruh hambatan yang ditemukan pada penelitian lain juga terjadi pada setiap UMKM di Desa Bulurejo. Kondisi pelaku usaha di Bulurejo tetap perlu dipahami berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan pola transaksi masing-masing.

Perbedaan kesiapan UMKM dalam menggunakan QRIS dapat dipahami melalui *Technology Acceptance Model* (TAM). Model ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi berkaitan dengan penilaian pengguna mengenai kemudahan dan manfaat teknologi tersebut.[12] Dalam konteks kegiatan ini, edukasi dan pendampingan telah memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengenal proses pendaftaran serta penggunaan QRIS. Akan tetapi, keputusan untuk menggunakan QRIS tetap dipengaruhi oleh penilaian pribadi pelaku usaha mengenai apakah layanan tersebut mudah dioperasikan dan benar-benar berguna bagi kebutuhan usahanya.

Pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan telepon seluler untuk transaksi, belum memiliki perangkat yang mendukung, atau masih menganggap QRIS rumit dapat dikaitkan dengan persepsi kemudahan penggunaan yang belum terbentuk secara kuat. Pendampingan langsung dapat membantu mengurangi kesulitan teknis pada tahap awal, tetapi tidak selalu langsung menghilangkan kekhawatiran atau rasa kurang percaya diri untuk menggunakan aplikasi secara mandiri setelah kegiatan selesai. Karena itu, UMKM yang belum menggunakan QRIS tidak tepat langsung dikategorikan sebagai pihak yang menolak digitalisasi. Mereka lebih tepat dipahami sebagai pelaku usaha yang masih memerlukan waktu, pengalaman praktik, dan pendampingan bertahap.

Sementara itu, pelaku usaha yang memilih transaksi tunai atau transfer bank dapat dikaitkan dengan persepsi kemanfaatan QRIS. Apabila pembayaran tunai dan metode yang telah digunakan selama ini masih dianggap cukup, manfaat tambahan QRIS belum tentu dirasakan secara nyata. Materi pendampingan berikutnya perlu menjelaskan manfaat QRIS berdasarkan kebutuhan usaha, misalnya sebagai pilihan pembayaran ketika pembeli tidak membawa uang tunai, kemudahan menerima pembayaran dari berbagai aplikasi melalui satu kode, dan dukungan terhadap pencatatan transaksi. Penjelasan yang dikaitkan dengan situasi usaha sehari-hari akan lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan yang hanya menekankan digitalisasi secara umum.

Aspek keamanan juga perlu menjadi bagian dari tindak lanjut kegiatan. Walaupun kekhawatiran mengenai risiko transaksi digital tidak dicatat sebagai alasan utama secara khusus, pelaku usaha perlu memahami cara memastikan bahwa pembayaran telah diterima dengan benar. Pendampingan dapat mencakup praktik mengecek notifikasi dan riwayat transaksi pada aplikasi merchant, memeriksa kesesuaian nominal pembayaran, serta menjaga PIN dan kode OTP agar tidak diberikan kepada pihak lain.[13] Pemahaman tersebut diperlukan agar pelaku usaha lebih siap menggunakan QRIS secara mandiri dan tidak hanya berhenti pada tahap pembuatan akun.

Dengan demikian, jumlah UMKM yang berhasil membuat QRIS belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan kegiatan. Sebanyak 12 UMKM yang mengikuti pendampingan hingga proses pembuatan QRIS selesai menunjukkan adanya kesiapan awal untuk mencoba pembayaran digital. Sementara itu, 24 UMKM yang belum menggunakan QRIS menunjukkan bahwa penerimaan teknologi memerlukan proses yang lebih bertahap. Tindak lanjut yang diperlukan tidak hanya berupa ajakan untuk mendaftar, tetapi juga latihan penggunaan QRIS, penjelasan manfaat yang sesuai dengan kondisi usaha, edukasi keamanan transaksi, dan kunjungan ulang apabila pelaku usaha sudah merasa siap menggunakan QRIS.

### **3.4. Keberlanjutan Program dan Keterbatasan Kegiatan**

Pelaksanaan selama enam hari cukup untuk melakukan pemetaan, memberi penjelasan awal, dan membantu pembuatan QRIS. Waktu tersebut belum cukup untuk mengetahui apakah kebiasaan

pembayaran pelaku usaha berubah. UMKM yang baru memperoleh QRIS masih perlu mencoba menerima transaksi, mengecek nominal, melihat saldo, dan memahami pencairan dana. Tanpa tindak lanjut, QRIS dapat saja sudah tersedia tetapi jarang digunakan.

Tindak lanjut dapat dimulai dengan simulasi pada minggu pertama untuk memastikan kode dapat dipindai dan pembayaran masuk dengan benar. Pada bulan pertama, pendamping dapat menanyakan pengalaman transaksi, kesulitan membaca riwayat pembayaran, dan proses pencairan. Evaluasi pada bulan kedua atau ketiga dapat melihat frekuensi penggunaan serta kemungkinan memanfaatkan riwayat transaksi untuk pencatatan keuangan sederhana. UMKM yang belum berminat tetap dapat mengikuti edukasi ulang tanpa kewajiban mendaftar.[14]

Kegiatan ini mempunyai beberapa keterbatasan. Pengetahuan peserta tidak diukur sebelum dan sesudah edukasi. Alasan belum menggunakan QRIS juga tidak dicatat dalam bentuk frekuensi per kategori. Selain itu, belum ada pemantauan transaksi setelah pendaftaran, dan kegiatan tidak mengukur omzet, kepuasan konsumen, maupun efisiensi waktu. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa QRIS meningkatkan pendapatan. Hasil yang dapat dipertanggungjawabkan terbatas pada jangkauan edukasi, bertambahnya akses pembuatan QRIS, dan pemetaan hambatan awal.

#### **4. Kesimpulan**

Program pendampingan di Desa Bulurejo menjangkau 56 UMKM melalui kunjungan langsung, edukasi, dan bantuan pembuatan QRIS melalui GoPay Merchant. Sebelum kegiatan, 20 UMKM sudah memiliki QRIS. Sebanyak 12 UMKM mengikuti pendampingan sampai proses pembuatan selesai, sehingga pada akhir kegiatan terdapat 32 UMKM yang tercatat mempunyai akses QRIS. Sebanyak 24 UMKM belum mengadopsinya karena belum terbiasa menggunakan telepon seluler untuk transaksi, menilai pembayaran digital rumit, telah memakai metode lain, atau masih memilih pembayaran tunai. Pendekatan door-to-door membantu tim menyesuaikan penjelasan dengan kondisi setiap usaha. Walaupun demikian, kepemilikan QRIS belum sama dengan penggunaan aktif. Program berikutnya perlu menambahkan simulasi pembayaran, edukasi keamanan akun, pencatatan keuangan, dan pemantauan selama satu sampai tiga bulan. Pendampingan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tetap menghormati kesiapan serta keputusan masing-masing pelaku UMKM.

Agar program ini tidak berhenti di tengah jalan, pemerintah desa dan pihak terkait perlu mengambil beberapa langkah tindak lanjut yang bersifat berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sekali jalan. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan pemberian insentif ringan yang bersifat mendorong, bukan memaksa, misalnya prioritas dalam program bantuan UMKM atau pencantuman dalam direktori usaha desa bagi mereka yang aktif menggunakan QRIS. Kolaborasi dengan penyedia layanan, dalam hal ini GoPay Merchant atau mitra terkait, juga perlu diijak untuk memberikan dukungan teknis lanjutan, seperti layanan bantuan atau materi edukasi yang sederhana dan mudah dipahami, mengingat kendala utama yang dihadapi UMKM bukan berasal dari penolakan terhadap digitalisasi, melainkan keterbatasan familiaritas dengan teknologi. Keberlanjutan program juga menuntut adanya dukungan anggaran yang jelas, misalnya melalui alokasi APBDes, agar pendampingan lanjutan tidak berhenti hanya karena program awal bersifat sementara

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bulurejo, para pelaku UMKM yang bersedia menerima edukasi dan pendampingan, serta tim Kuliah Kerja Nyata UIN Raden Mas Said Surakarta yang membantu kegiatan di lapangan.

## Daftar Pustaka

- [1] Bank Indonesia, "Karya Kreatif Indonesia 2026: Inovasi Digital Kunci UMKM Naik Kelas," Aug. 21, 2026. [Online]. Available: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2816726.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2816726.aspx). (Accessed: Aug. 30, 2026).
- [2] Bank Indonesia, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." [Online]. Available: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx>. (Accessed: Aug. 30, 2026).
- [3] Bank Indonesia, "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran," Feb. 19, 2025. [Online]. Available: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG\\_032025.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_032025.aspx). (Accessed: Aug. 30, 2026).
- [4] I. W. A. Setiawan and L. P. Mahyuni, "QRIS di mata UMKM: Eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 9, no. 10, pp. 921–946, 2020.
- [5] H. Listiyono, S. Sunardi, E. N. Wahyudi, and D. A. Diartono, "Dinamika implementasi QRIS: Meninjau peluang dan tantangan bagi UMKM Indonesia," *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, vol. 8, no. 2, pp. 120–126, 2024.
- [6] V. A. Arsalna and H. As'ari, "Pendampingan digitalisasi mitra UMKM dalam penerapan QRIS di Desa Dagen, Kabupaten Karanganyar," *IKRA-ITH ABDIMAS*, vol. 9, no. 3, pp. 626–633, 2025.
- [7] M. R. Fadilah and D. R. Gustiani, "Efisiensi penggunaan QRIS dengan GoPay Merchant dalam transaksi pembayaran non-tunai di Kampung Cisangku Desa Malasari," *Sahid Da'watii Dedicate*, vol. 2, no. 2, pp. 23–29, 2025.
- [8] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [9] P. G. Subhaktiyasa, S. A. K. Candrawati, N. P. Sumaryani, N. W. Sunita, and Abd. Syakur, "Penerapan statistik deskriptif: Perspektif kuantitatif dan kualitatif," *Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, vol. 14, no. 1, pp. 96–104, 2025, doi: 10.59672/emasains.v14i1.4450.
- [10] W. S. Rahardjo, "Analisis manfaat dan kendala adopsi QRIS pada UMKM: Temuan survei lapangan di wilayah Ciyumajakuning," *Journal of Economics and Business UBS*, vol. 14, no. 6, pp. 1610–1620, 2025, doi: 10.52644/qkdwe827.
- [11] Y. Apriyanti *et al.*, "Pendampingan optimalisasi transaksi digital melalui implementasi QRIS bagi UMKM di Desa Mayong Lor," *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, vol. 7, no. 2, pp. 75–81, 2025.
- [12] E. Sholihah and R. Nurhapsari, "Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: Intensi pengguna QRIS berdasarkan Technology Acceptance Model," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, vol. 12, no. 1, pp. 1–12, 2023.
- [13] F. Zehro and Sudianto, "Pengaruh penggunaan QRIS BSI terhadap keamanan bertransaksi nontunai bagi pelaku UMKM Pamekasan," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 4, pp. 2504–2514, 2025.
- [14] S. Alsukri, N. Hayani, S. S. E. Putri, and I. C. Putra, "Pendampingan adopsi QRIS sebagai upaya mendukung transformasi pembayaran digital pada UMKM," *Proficio: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 674–684, 2026.